

ABSTRAK

Cyberphishing merupakan salah satu bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) yang dilakukan dengan cara meniru entitas tepercaya melalui media elektronik untuk mencuri data pribadi, akun, atau informasi finansial korban. Seiring perkembangan teknologi, hasil kejahatan siber ini kerap disamarkan atau disembunyikan melalui Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), termasuk melalui media aset kripto. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaktepatan atau ketidaksesuaian antara beratnya perbuatan dan keuntungan ekonomi yang diperoleh terdakwa dengan sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis ketidaktepatan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) dalam putusan tersebut dinilai tidak tepat. Ketidaktepatan tersebut didasarkan pada alasan utama yaitu karena perbuatan yang dilakukan terdakwa memiliki jangkauan luas dan berdampak pada banyak korban yang dirugikan hingga ke berbagai negara serta terdakwa memperoleh keuntungan ekonomi yang sangat besar dan mengelola hasil keuntungan yang diperoleh tersebut dengan melakukan pencucian uang. Namun sanksi yang dijatuhkan tidak mencerminkan nilai kejahatan yang kuat tersebut sehingga tidak mencerminkan asas proporsionalitas. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan atau kesebandingan antara beratnya hukuman pidana dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Penjatuhan pidana yang tidak proporsional juga berpotensi menimbulkan disparitas pidana apabila dibandingkan dengan perkara lain yang memiliki karakteristik serupa. Perbuatan terdakwa termasuk *concursum realis* yaitu beberapa kejahatan yang terpisah dan saling berkaitan antara tindak pidana asal yaitu *cyberphishing* dan tindak pidana lanjutan yaitu pencucian uang. Penerapan *concursum* berkaitan erat dengan penentuan berat ringannya pidana. Dalam hal terjadi *concursum realis*, hakim seharusnya memiliki ruang yang lebih berat dalam menjatuhkan pidana.

Kata kunci: asas proporsionalitas - *cyberphishing* - pencucian uang

ABSTRACT

Cyberphishing is a form of cybercrime committed by impersonating a trusted entity through electronic means to steal victims' personal data, accounts, or financial information. With technological advancements, the proceeds of this cybercrime are often disguised or hidden through Money Laundering, including through crypto assets. This research was motivated by the inaccuracy or mismatch between the severity of the offense and the economic gain obtained by the defendant and the criminal sanctions imposed in Decision Number 85/Pid.Sus/2022/PN Bjb. Therefore, this study was conducted to analyze the judge's inaccuracy in imposing criminal sanctions.

The research method used was normative legal research (juridical normative) using a statute approach and a case approach.

*The results of the study indicate that the imposition of a criminal sanction of 2 years and 6 months imprisonment and a fine of Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah) in the decision is considered inappropriate. This inappropriateness is based on the main reason, namely because the defendant's actions were wide-ranging and impacted many victims who were harmed in various countries. The defendant also obtained enormous economic benefits and managed the profits obtained through money laundering. However, the sanctions imposed do not reflect the strong value of the crime and therefore do not reflect the principle of proportionality. This principle requires a balance or proportion between the severity of the criminal penalty and the level of seriousness of the crime committed. Imposing a disproportionate sentence also has the potential to create a disparity in punishment when compared to other cases with similar characteristics. The defendant's actions include *concursum realis*, namely several separate and interrelated crimes, namely the predicate crime, namely cyberphishing, and the subsequent crime, namely money laundering. The application of *concursum* is closely related to determining the severity of the sentence. In the event of *concursum realis*, the judge should have more leeway in imposing a sentence.*

Keywords: principle of proportionality - cyberphishing - money laundering

.